KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO BARANG MILIK NEGARA

NOMOR SOP	KH.19.02.02.06a
TANGGAL PEMBUATAN	25 FEBRUARI 2025
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	5 MARET 2025
DISAHKAN OLEH	Sekretaris Jenderal Nico Afinta
NAMA SOP	SOP PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
8. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. PPK :
   a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penyusunan persiapan pengadaan barang/jasa yang meliputi penetapan KAK/Spesifikasi Teknis, penyusunan dan penetapan HPS serta rancangan kontrak;
   b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa dan Sertifikat PPK Negara Tersertifikasi (PNT).
2. Kepala UKPBJ:
   a. Memiliki kemampuan memilih personil yang kompeten dalam pelaksanaan persiapan pengadaan barang/jasa;
   b. Memiliki kompetensi teknis di bidang pengadaan barang/jasa.
3. Pokja Pemilihan:
   a. Memiliki pemahaman tentang proses persiapan pengadaan barang/jasa;
   b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa;
   c. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

KETERKAITAN :

1. SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa;
2. SOP Perencanaan Pengadaan;
3. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi;
4. SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi;
5. SOP Pelaksanaan Kontrak.

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa;
2. Jaringan Internet;
3. Panduan penggunaan SPSE;
4. Komputer / Scanner / Printer.

PERINGATAN :

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka proses pemilihan penyedia dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa akan terhambat.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual sehingga dapat dipergunakan saat diperlukan kembali.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPK	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengkoneksikan paket pengadaan kepada pokja pemilihan.				Surat Keputusan Penetapan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	1 Jam	Paket pengadaan terkoneksi dengan pokja pemilihan.	
2.	Mengundang PPK untuk melakukan reviu dokumen persiapan pemilihan.				1. Dokumen Persiapan Pengadaan (Spesifikasi Teknis/KAK dan Gambar (jika ada), HPS, Rancangan Kontrak); 2. RKA-KL; 3. ID Paket RUP;	5 Hari	Surat undangan reviu dokumen persiapan pemilihan.	Pokja pemilihan menyampaikan undangan melalui aplikasi SPSE
3.	Melakukan reviu terhadap Dokumen Persiapan Pengadaan: a. Jika lengkap dilanjutkan dengan penetapan metode pemilihan; b. Jika tidak lengkap disampaikan kepada PPK untuk diperbaiki.			(b) (a)	1. Surat Keputusan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa; 2. Dokumen Persiapan Pengadaan.	3 Hari	1. Berita Acara Hasil Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan; 2. Usulan perubahan (jika ada).	Berita Acara Reviu diunggah oleh Pokja Pemilihan pada SPSE
4.	Memperbaiki Dokumen Persiapan Pengadaan dan/atau menyampaikan kembali kepada Pokja Pemilihan.				1. Dokumen Persiapan Pengadaan/Addendum Dokumen Persiapan Pengadaan; 2. Berita Acara Hasil Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan.	4 Hari	Perbaikan Dokumen Persiapan Pengadaan	
5.	Menetapkan: a. Metode Pemilihan Penyedia; b. Metode Penetapan Kualifikasi; c. Persyaratan Kualifikasi; d. Metode Evaluasi Penawaran; e. Persyaratan Teknis Penyedia; dan f. Metode Penyampaian Penawaran.				Dokumen Persiapan Pengadaan	1 Hari	1. Berita Acara Persiapan Pemilihan berisi: 2. Metode pemilihan penyedia; 3. Metode penetapan kualifikasi; 4. Persyaratan kualifikasi; 5. Metode evaluasi penawaran; 6. Persyaratan teknis; dan 7. Metode penyampaian penawaran.	
6.	Menyusun dan menetapkan Tahapan serta Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia.				1. Dokumen Persiapan Pengadaan; 2. Metode Pemilihan; 3. ID Paket RUP; 4. Draft Paket Pemilihan.	1 Hari	Jadwal Pemilihan ditetapkan	
7.	Menyusun dan menetapkan Dokumen Pemilihan.				1. Dokumen Persiapan Pengadaan; 2. Metode Pemilihan; 3. Jadwal Pelaksanaan.	3 Hari	Dokumen Pemilihan	

Nama Jabatan	Paraf	Tanggal
PPBJ Ahli Madya		24/02/25
Kepala Bagian PBJ dan TU		24/2/2025
Kepala Biro Barang Milik Negara		25/2/25